

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

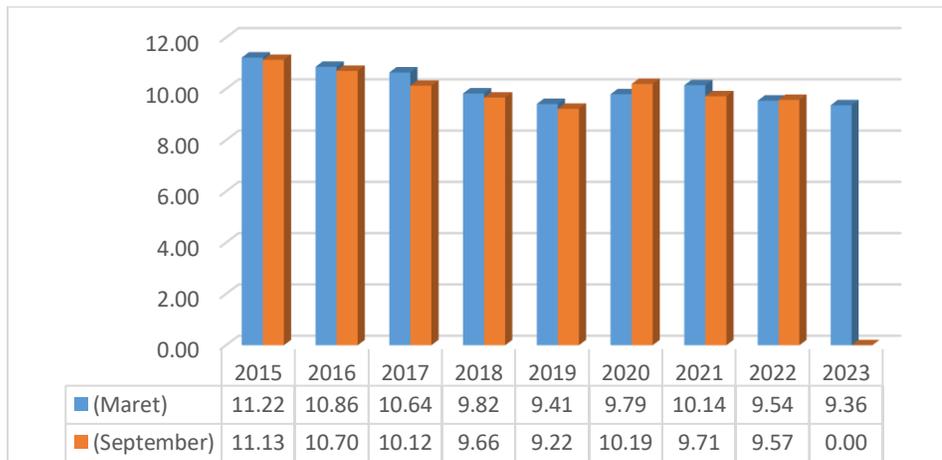
### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan yakni upaya demi mengantisipasi ketimpangan yang terakumulasi. Maknanya, perubahan yang timbul pada keadaan keseimbangan dahulu sanggup mengakibatkan perubahan pada sistem sosial sehingga menyebabkan sistem yang ada menyimpang dari keadaan keseimbangan dahulu. Penjadwalan memegang peranan yang sangat krusial dalam prosedur pembangunan. Salah satu tugas penjadwalan adalah mengarahkan prosedur pembangunan mengarahkan keinginan yang ingin dicapai dan dijadikan demi tolak ukur kesuksesan prosedur pembangunan yang dilaksanakan. Di sisi lain, pembangunan bermakna sebagai usaha yang dilaksanakan untuk memajukan progres PDB pada tahap nasional atau PDRB pada tahap daerah.

Otoritas sadar kalau pembangunan domestik merupakan salah satu usaha demi menggapai rakyat adil dan makmur. Searah pada niat itu, beragam usaha pembangunan dilakukan dengan sasaran pembangunan daerah, terutama di daerah yang pasti kemiskinannya selalu meningkat pada waktu ke waktu. Pembangunan daerah dilaksanakan secara terintergrasi dan berkelanjutan searah dengan pengutamaan dan keperluan tiap-tiap daerah, berdasarkan akar pembangunan nasional dan tujuan yang dipastikan menempuh pembangunan berkelanjutan dan dalam waktu singkat. Pada hakikatnya, satu diantara yang ada faktor kunci keefektifan pembangunan domestik yaitu berkurangnya total rakyat miskin. Pengaruh penurunan total rakyat miskin menggambarkan faktor terpenting dalam pemilihan skema dan implementasi pembangunan. Artinya, salah satu prinsip kunci dalam memilih bidang prioritas atau bidang

utama pembangunan nasional yaitu efektivitasnya dalam mengurangi jumlah penduduk miskin (Simatupang & Dermoredjo, 2003).

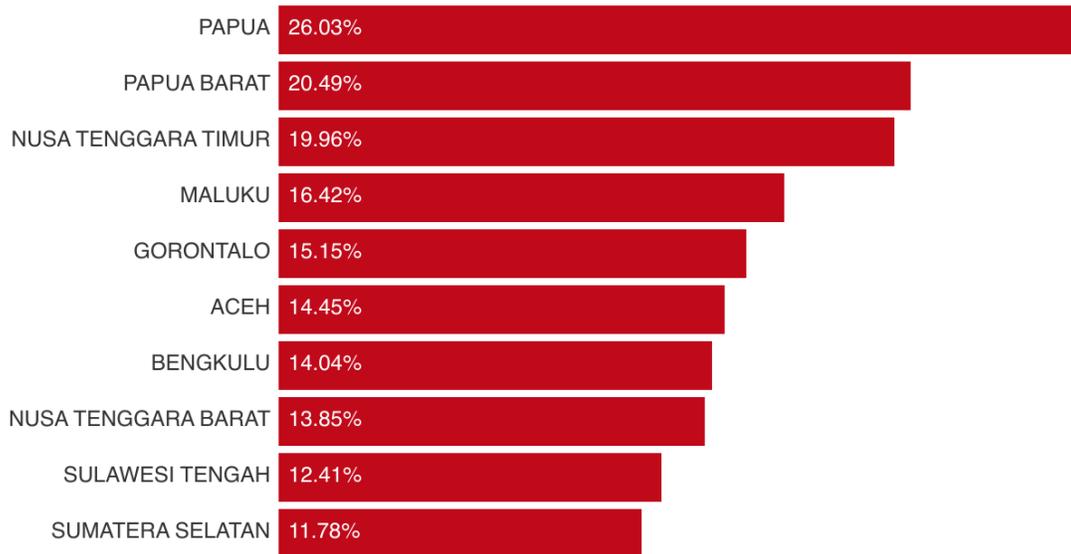
Kemiskinan pada dasarnya memiliki banyak dimensi dan mengembangkan definisi kemiskinan menentukan siapa yang dianggap penduduk miskin, banyak aspek kehidupan masyarakat miskin dengan akses pasar dan infrastruktur yang terbatas (Banerjee, 2002). Kemiskinan termasuk kedalam isu global yang sedang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut BPS (2023), Indonesia termasuk negara berkembang dengan jumlah penduduk miskin pada 2022 sebesar 26,36 juta jiwa.



Gambar 1.1 “Persentase penduduk miskin Di Indonesia 2015-2023”

Pada periode 2015, pemerintah Indonesia meluncurkan program pengentasan kemiskinan “Nawashita” yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan pada tahun 2015 hingga 2019, sehingga dapat dilihat pada gambar diatas kemiskinan Indonesia pada tahun 2015-2019 cenderung menurun. Sejak Maret 2017 sampai September 2022, nilai kemiskinan Indonesia mendapati penurunan baik secara total maupun persentase, kecuali dari Maret 2020 hingga Maret 2021 yang disebabkan oleh pandemi penyakit virus Covid-19 yang melanda Indonesia.

Menurut (CNBC 2023), berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 10 provinsi dengan tingkat kemiskinannya yang diatas 10%.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.2 “10 Provinsi Dengan persentase penduduk miskin Tertinggi Di Indonesia 2023”

Berdasarkan data BPS, Papua saat ini menduduki peringkat pertama provinsi termiskin. Angka kemiskinan mencapai 26,03%. Papua Barat masih berada di peringkat kedua dengan angka kemiskinan 20,49%. Di peringkat ketiga terdapat Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 19,96%. Penyebab dari melesatnya kemiskinan di papua dikarenakan ekonominya yg jatuh Perekonomian Papua mengalami kontraksi sebesar 2,39% (year-on-year) pada triwulan I tahun 2023, namun tumbuh sebesar 3,41% pada triwulan II tahun 2023. Tingkat angka pengangguran di Papua juga meningkat menjadi 3,49% per Februari 2023 dari 2,83% pada Agustus 2022 (CNBC, 2023).

Provinsi Papua merupakan Provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Karena kemiskinannya yang tinggi oleh karena itu pemerintah perlu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua. Ditemukan sejumlah faktor yang mendatangkan kemiskinan.

Kuncoro (2006) menyatakan bahwa salah satu sumber kemiskinan yakni rendahnya kualitas sdm yang disebabkan atas kurangnya pendidikan yang memadai. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu. Pengembangan sektor pendidikan menjadi fondasi utama dalam menciptakan sdm yang berkualitas untuk pembangunan ekonomi, serta merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi negara.

Peningkatan pendidikan dengan akhirnya menaikkan kualitas dan produktivitas manusia, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, pendidikan memegang peranan penting dalam menunjang langkah produktivitas dan kegiatan ekonomi lainnya. Pendidikan mengembangkan kemahiran dan meningkatkan produktivitas melampaui perolehan pengetahuan dan keahlian. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin banyak pengetahuan dan keahlian yang diperoleh, serta kualitas produktivitas tenaga kerja akan semakin meningkat

Gini ratio yaitu salah satu dari beberapa aspek yang memengaruhi kemiskinan. Menurut dari Barber, B.M & Terrance Odean (2008) dalam Samuel Annim (2012) melihat bahwa koneksi antara disparitas dan kemiskinan menjadi koneksi yang logis, yakni maka disparitas dapat memicu kemiskinan kian serius.

Aspek yang memicu kemiskinan adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya bergantung pada jumlah kelahiran. Jika jumlah penduduk tidak

dapat dikendalikan maka menjadi masalah bagi pemerintah karena angka kemiskinan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Menurut Malthus, Pertambahan penduduk yang berkesinambungan menandakan salah satu faktor yang di haruskan untuk menunjang permintaan lebih lanjut. Namun, terdapat juga kekhawatiran bahwa pertumbuhan penduduk akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang pada kesempatannya bakal berdampak dalam kesejahteraan dan, pada akhirnya, kemiskinan. Hal ini disebabkan karena keberadaan kesempatan kerja tidak dapat memenuhi permintaan tenaga kerja yang diciptakan oleh pertumbuhan penduduk.

Menurut Todaro, Michael P Smith (2006) pertumbuhan jumlah penduduk memiliki dampak terhadap peluang untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Terlalu banyak orang akan membebani keuangan negara, yang telah terlalu seadanya untuk memasok beragam layanan medis, ekonomi dan sosial kepada angkatan baru. Meningkatnya tanggungan keuangan pada anggaran nasional akan memangkas kapasitas dan kesanggupan otoritas untuk menumbuhkan standar hidup dari generasi ke generasi, sehingga meningkatkan transmisi kemiskinan dari rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah ke generasi mendatang.

Jumlah penduduk mempengaruhi tingkat kemiskinan karena pendapatan per kapita menurun akibat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jika hal ini tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja, maka banyak orang yang menjadi pengangguran dan kualitas hidupnya menurun. Hal ini akan menyebabkan kemiskinan.

Populasi yang besar berkontribusi pada peningkatan kemiskinan, sementara tingginya angka kelahiran mempercepat laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini berkaitan dengan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, angka persalinan

yang melonjak menambah tanggungan biaya keluarga dan memperbesar ketergantungan ekonomi.

Perkembangan ekonomi yakni satu diantara yang ada indikator keefektifan kemajuan ekonomi. Kemajuan perekonomian dinyatakan atas derajat perkembangan yang diakibatkan atas transformasi produksi domestik. Pertumbuhan ekonomi adalah tekad untuk memupuk daya produksi guna membuat bonus output, yang ditakar melalui PDB nasional dan PDRB (Wihastuti, 2008).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah tolok ukur yang umum digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah. Misalnya, jika PDRB suatu provinsi meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, ini mengindikasikan bahwa produksi barang dan jasa seperti pertanian, industri, dan jasa di provinsi tersebut juga mengalami peningkatan. (Badan Pusat Statistik Yogyakarta, 2017).

Pengangguran memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan. Pengangguran merujuk pada situasi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja aktif mencari pekerjaan atau sedang dalam proses transisi menuju pekerjaan baru namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Salah satu jenis pengangguran ini disebut pengangguran terbuka. Menurut Jundi & Poerwono (2014), pengangguran terbuka seringkali terjadi ketika pertumbuhan angkatan kerja melampaui pertumbuhan lapangan kerja, sehingga banyak individu yang siap bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Sukirno (2012) menyimpulkan bahwa pengangguran mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi taraf hidup mereka. Penurunan kemakmuran akibat pengangguran menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin dan naiknya garis kemiskinan. Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh keterbatasan lapangan

pekerjaan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di kalangan masyarakat setempat, yang menghambat mereka untuk bekerja dan menciptakan peluang usaha.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak Rata-rata Lama Sekolah atas Persentase Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Papua?
2. Bagaimana dampak Rasio Gini atas Presentase Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Papua?
3. Bagaimana dampak Jumlah Penduduk atas Presentase Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Papua?
4. Bagaimana dampak PDRB atas Presentase Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Papua?
5. Bagaimana dampak Tingkat Pengangguran Terbuka atas Presentase Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Papua?
6. Bagaimana dampak Pengeluaran perKapita atas Presentase Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Papua?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami Persentase Kemiskinan di Kab/Kota di Provinsi Papua berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah.
2. Untuk memahami Persentase Kemiskinan di Kab/Kota di Provinsi Papua berdasarkan Rasio Gini.
3. Untuk memahami Persentase Kemiskinan di Kab/Kota di Provinsi Papua berdasarkan Jumlah Penduduk.
4. Untuk memahami Persentase Kemiskinan di Kab/Kota di Provinsi Papua berdasarkan PDRB.

5. Untuk memahami Persentase Kemiskinan di Kab/Kota di Provinsi Papua berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka.
6. Untuk memahami Persentase Kemiskinan di Kab/Kota di Provinsi Papua berdasarkan Pengeluaran Perkapita.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Studi ini semoga sanggup memberikan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Teoritis

Studi ini semoga sanggup menyempurnakan studi mengenai Persentase Kemiskinan yang terjadi di Kab/Kota Provinsi Papua.

2. Fungsi Praktis

- a. Bagi Peneliti

Studi ini semoga sanggup menyempurnakan kajian mengenai Persentase Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Papua.

- b. Bagi Civitas Akademika

Studi ini semoga sanggup meninggalkan kontribusi dalam menyempurnakan kajian tentang Persentase Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua, serta mendukung pengembangan studi terkait penyebab tingginya Persentase Kemiskinan di wilayah tersebut.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Papua. Atas demikian prosedur yang dinyatakan pemerintah

merupakan prosedur yang akurat dan memiliki target akhir yaitu menurunkan Persentase Kemiskinan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan membantu masyarakat dalam memahami penyebab dari tingginya Persentase Kemiskinan.